

MEN-SUBJEK-KAN MASYARAKAT PERBATASAN: TELAAH ATAS PERAN MEDIA BARU DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA

PUJI RIANTO

(Staff Pengajar Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Email: p.rianto1976@gmail.com)

ABSTRAK

Media baru yang mengaburkan batas antara penerima dan pemroduksi pesan menawarkan peluang bagi representasi yang lebih luas masyarakat perbatasan. Ini karena-melalui media baru-masyarakat perbatasan dapat menampilkan diri secara terbuka tanpa terkendala oleh para gate keeper media massa. Dengan begitu, mereka bisa menjadi subjek bagi dirinya sendiri dengan tampil melalui blog, facebook, twitter, dan sebagainya. Namun, persoalannya bahwa masyarakat perbatasan menghadapi kelangkaan infrastruktur dan kurangnya literasi media. Akibatnya, mereka lebih sering menjadi objek dibandingkan sebagai subjek. Tulisan ini didasarkan atas observasi dan penelitian yang penulis lakukan pada 2012 dan 2016 yang dibiayai oleh LPP RRI di wilayah perbatasan (Batam, Entikong, Nunukan, Jayapura, dan Atambua). Selama penelitian tersebut, temuan-temuan di lapangan menemukan bahwa masyarakat perbatasan termajinalkan dari sisi komunikasi. Mereka tidak terepresentasikan dengan baik sebagai subjek warga negara. Langkanya infrastruktur membuat akses mereka terhadap media terbatas. Sebaliknya, mereka lebih banyak mendapatkan informasi dari negara tetangga, terutama Malaysia dan Timor Leste. Keberadaan media baru jelas memberikan peluang yang sangat besar untuk menjadikan masyarakat perbatasan sebagai subjek. Di beberapa perbatasan, teknologi internet telah diakses dengan baik. Namun, infastruktur lainnya dan pendidikan kurang pendukung. Oleh karena itu, perlu pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, dan literasi digital. Tanpa itu, masyarakat perbatasan akan tetap menjadi objek dalam dunia komunikasi yang semakin global.

Kata Kunci: subjek, media baru, masyarakat perbatasan

PENDAHULUAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan subjek sebagai (1) pokok pembicaraan atau pokok bahasan; (2) bagian klausa yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara (seperti bisa dilihat dalam ‘subjek pembicaraan’ atau pokok kalimat; (3) pelaku; (4) mata pelajaran; (5) orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembuntutan sebagai sasaran. Berdasarkan makna leksikal ini, yakni makna kata yang didasarkan atas kamus, maka subjek yang dimaksud dalam makalah ini adalah subjek dalam pengertian yang pertama dan ketiga, yakni subjek sebagai pelaku. Dengan demikian, men-subjek-kan dalam judul “Men-subjek-kan Masyarakat Perbatasan” dimaksudkan sebagai pelaku. Artinya, makalah ini berusaha menghadirkan upaya-upaya untuk menjadikan masyarakat perbatasan

sebagai 'subjek' pelaku dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan juga politik. Subjek yang secara aktif bertindak atas nama dirinya dalam kerangka kehidupan berbangsa. Gagasan ini didasari oleh latar belakang bahwa masyarakat perbatasan selama ini lebih sering menjadi 'objek' bagi banyak kebijakan di perbatasan yang dilakukan negara. Dalam banyak kasus, mereka dipaksa menerima segala proyek pembangunan yang dilakukan pusat tanpa melibatkannya dalam prosesnya. Masyarakat perbatasan 'dipaksa' menerima apa yang telah diberikan kepada pusat tanpa diberi kesempatan untuk mendefinisikan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri.

Di sisi lain, 'men-subjek-kan' dalam judul makalah ini juga berarti yang pertama, yakni sebagai pokok pembicaraan. Selain masyarakat perbatasan hanya menjadi 'objek' dari banyak kebijakan negara, masyarakat perbatasan sendiri jarang dihadirkan sebagai suatu topik pembicaraan. Jikapun ada pembicaraan atau representasi bagi masyarakat perbatasan maka hal itu lebih terkait dengan persoalan-persoalan politik perbatasan, yang berujung pada persoalan-persoalan keamanan dan kejahatan perbatasan. Sebaliknya, mereka tidak menjadi pokok bahasan penting sebagaimana halnya pembicaraan mengenai masyarakat dan wilayah-wilayah di pusat pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat perbatasan tidak hanya mengalami marginalisasi geografis karena letaknya di ujung, tapi juga wacana. Padahal, dalam wacana itulah, subjek hadir.

Langkanya masyarakat perbatasan menjadi 'pokok pembahasan penting' dalam lanskap pembangunan negara membuat masyarakat di wilayah ini mengalami keterbelakangan pembangunan, terutama jika dibandingkan dengan kota-kota pusat. Masyarakat perbatasan karenanya hampir selalu tertinggal dalam pembangunan, baik pembangunan dalam pengertian fisik (dalam bentuk pembangunan infrastruktur) dan pembangunan sosial. Di wilayah perbatasan Kalimantan, misalnya, masyarakat Nunukan mengalami kekurangan pasokan listrik, sementara tidak jauh dari situ (Tarakan) merupakan gudang sumber daya alam minyak dan gas. Ini terjadi karena langkanya perbatasan sebagai subjek penting dalam diskusi di tingkat nasional sehingga pembangunan di wilayah perbatasan tidak menjadi prioritas. Ini terjadi terutama selama masa Orde Baru. Oleh karena itu, gagasan *centering the margin* yang dibawa oleh pemerintah Jokowi-JK menarik karena gagasan itu hendak menjadikan masyarakat perbatasan sebagai pusat aktivitas kultural, ekonomi, dan sosial. *Centering the margin* mengindikasikan bahwa daerah-daerah pinggiran menjadi subjek penting baik dalam arti subjek-pelaku maupun subjek-pokok bahasan.

Kehadiran media baru yang lebih partisipatif menciptakan harapan bagi upaya menjadi masyarakat perbatasan sebagai subjek, baik dalam pengertian pelaku maupun pokok bahasan. Seperti dikemukakan Chaffee dan Metzger (2001), media baru dalam bentuk internet dirancang untuk lebih terdesentralisasi, yang meletakkan kontrol pada semua *user*. Berbeda dengan media konvensional dimana kontrol pesan ada pada institusi media, tidak demikian dalam media baru. Dalam media baru, khalayak terlibat aktif baik dalam mencari, berhubungan, dan menyaring bentuk-bentuk pesan yang ada. Para pengguna internet atau media baru bahkan mampu menciptakan dan mendistribusikan beragam pesan komunikasi yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh kelompok tertentu. Tulisan singkat di *facebook*, cuitan di *twitter* bisa tersirkulasikan dengan cepat karena sistem jaringan sosial yang

dibangun oleh media baru. Bahkan, jika diperlukan para pengguna media baru bisa mengisolasi diri dari terpaan media massa sementara pada waktu bersamaan membangun komunitas sendiri dalam dunia maya melalui teknologi internet. Tulisan ini karenanya akan menjawab persoalan-persoalan ini. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana men-subjekkan masyarakat perbatasan, terutama dengan memanfaatkan potensi maksimal media baru? Selanjutnya, apa yang harus dilakukan agar upaya tersebut berhasil?

PEMBAHASAN

Sifat Partisipatif Media Baru

Dalam *New Media: Critical Introduction*, Lister dkk (2009) mengemukakan bahwa ketika mengambil istilah media baru maka biasanya hal itu merujuk pada enam ciri utama. *Pertama*, pengalaman-pengalaman tekstual baru (*new textual experiences*): bentuk-bentuk baru genre dan teks, hiburan, kesenangan dan pola-pola konsumsi media (permainan komputer, simulasi, efek khusus film). *Kedua*, cara-cara baru dalam merepresentasikan dunia. Media dalam cara yang tidak selalu jelas, menawarkan kemungkinan-kemungkinan representasional baru dan pengalaman-pengalaman (lingkungan virtual mendalam, layar-berbasis multimedia interaktif). *Ketiga*, bentuk-bentuk baru hubungan antarsubjek (pengguna dan konsumen) dan teknologi media. Hubungan-hubungan ini merujuk pada perubahan-perubahan dalam penggunaan dan penerimaan citra dan media komunikasi dalam kehidupan sehari-hari serta pemaknaan yang diberikan oleh teknologi media. *Keempat*, pengalaman-pengalaman baru dalam hubungan-hubungan antara bentuk, identitas, dan komunitas. Dalam hal ini, telah terjadi pergeseran dalam kehidupan personal dan juga pengalaman-pengalaman sosial terkait waktu, ruang, dan tempat yang mempunyai implikasi pada cara kita mengalami diri kita sendiri dan tempat-tempat kita di dunia. Dalam ruang percakapan 'virtual' yang disajikan oleh media baru, para partisipan bisa melakukan percakapan melintasi batas ruang dan waktu. *Kelima*, konsepsi baru mengenai hubungan-hubungan tubuh biologis pada teknologi media. Ini merujuk pada tantangan akan pembedaan yang diterima antara manusia dan artifisial, alam dan teknologi, tubuh dan (media sebagai) prosthesis teknologi, yang riil dan virtual. *Keenam*, pola-pola baru dalam organisasi dan produksi. Penataan kembali yang lebih luas dan penyatuan dalam budaya media, industri, ekonomi, akses, kepemilikan, kontrol dan regulasi.

Sifat partisipatif media baru yang memungkinkan setiap penggunanya memanfaatkan teknologi tersebut untuk berkomunikasi secara partisipatif dan interaktif, terutama akibat mengaburnya batas antara pengirim dan penerima pesan pada satu sisi, dan pergeseran khalayak massa. Hal itu bisa dilacak dalam tiga kecenderungan berikut.

Pertama, masyarakat massa mulai dipersoalkan ketika khalayak media tak lagi bisa dibedakan dengan jelas antara produsen dan 'konsumen' pesan media. Melalui media baru, khalayak bisa bertindak sebagai konsumen dan sekaligus produsen pesan media dalam waktu yang hampir bersamaan.

Kedua, sifat interaktivitas media baru telah menggugat sifat anonimitas masyarakat massa yang bertahun-tahun menjadi ciri khas keberadaannya ketika dikaitkan dengan komunikasi massa. Sekarang ini, khalayak bisa berinteraksi dengan khalayak lain dalam isu-isu yang diminati bersama, bahkan mampu menggalang solidaritas di tingkat *grass root*

melalui situs jejaring sosial. Dalam situasi semacam ini, khalayak massa benar-benar dalam situasi yang problematis.

Ketiga, perkembangan teknologi media juga memungkinkan orang untuk ‘menikmati’ isi media melalui saluran-saluran yang jauh lebih spesifik. Melalui teknologi digital, para pengguna mempunyai lebih banyak pilihan terhadap program acara dan isi media. Akibatnya, lebih sedikit orang yang terikat pada pesan media yang sama dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu, istilah komunikasi massa tak lagi memadai untuk menggambarkan fenomena komunikasi sekarang sebagai akibat perkembangan *computing* dan teknologi komunikasi yang membuat batas-batas diantara bentuk-bentuk komunikasi menjadi cair (*blurred*) (Caffee dan Metzger, 2001). Bahkan, menurut Bermejo, kehadiran media baru membuat fenomena *rating* yang begitu kuat dalam industri media massa menjadi problematis (Bermejo, 2009). Ini karena orang menonton televisi tidak lagi menggunakan semata televisi konvensional yang biasanya dipasang di ruang-ruang strategis keluarga. Sebaliknya, para penikmat televisi sekarang ini bisa menyaksikan acara favorit mereka melalui streaming. Dengan demikian, ketika survei mengandalkan people meter yang dipasang di rumah-rumah maka rating benar-benar menjadi problematis. Tabel 1 menunjukkan perbedaan antara media baru atau Caffee dan Metzger menyebutnya sebagai media komunikasi dengan komunikasi massa.

Tabel 1
Perbedaan Antara “*Mass*” dan “*Media*” Komunikasi

	Mass Communication	Media Communication
Channels	Few	Many
Audience	Unified	Diverse
Control	Sender	User
Transmission	One-way, time-specific	Interactive, at convenience
Research Paradigm	Content analysis, effects on audience	Interface design, information search
Typification	Television	Video games, web sites
Motivation	Arousal	Need satisfaction
Ego Concept	Identification	Self-actualization
Social Control	Laws, profesional ethics, public education	Technical devices, monitoring
Learning	Social modeling	Experiential
Scala statistic	Number of murder a child sees by age 18	Number of murders a child commits by age 18

Pembedaan lainnya yang tidak kalah pentingnya untuk didiskusikan bahwa media baru telah membongkar struktur kerja media dan komunikasi massa. Dalam komunikasi massa, *output* media akan ditentukan oleh faktor-faktor seperti ideologi media, kekuatan-kekuatan ekstramedia, organisasi, rutinitas organisasi media, individu (Shoemaker dan Reese, 1996: 64) dan bahkan pemilik media (Keller, 2009). Dalam media baru, faktor-faktor itu hampir sama sekali bisa hilang karena individu memegang otoritas kunci dalam memproduksi pesan-pesan media. Jika dalam komunikasi massa *gate keeper* memegang peran kunci dan menentukan isu-isu penting media, dalam media baru dimana *sender* dan *receiver* berada dalam kondisi yang tumpang tindih, peran *gatekeeper* tak lagi bisa diandalkan. Barangkali memang, teknologi internet digunakan oleh media massa *mainstream*, tapi situs-situs mereka (seperti kompas.com, tempo.co dll) telah membuka ruang interaksi

antara pembaca/penonton dengan khalayaknya. Dalam konteks inipun, anonimitas sebagai salah satu ciri penting khalayak massa sudah mengalami pendefinisian ulang.

Ketiadaan *gatekeeper* dalam media baru juga memungkinkan khalayak untuk memunculkan isu-isu yang tidak ‘di-cover’ media massa *mainstream*. Isu-isu marginal yang dianggap tidak penting dan tidak mempunyai nilai berita menjadi ‘heboh’ di laman-laman media baru. Bahkan, dalam beberapa kasus di Indonesia, isu-isu yang menonjol di jejaring sosial mampu mempengaruhi agenda setting media. Sifat-sifat media baru inilah yang kemudian mendorong adanya diskusi lebih luas mengenai demokratisasi yang lebih atau bahkan radikalisme demokrasi (Rianto, 2011). Ini terjadi karena media baru membangun bentuk-bentuk baru komunikasi politik, memberikan ruang bagi diskusi publik yang lebih intens, dan bahkan membangun gerakan sosial yang lebih luas. Pada masa lalu, media massa-melalui teori *agenda setting* juga bisa mendorong solidaritas dan gerakan sosial, tapi fungsi-fungsi itu sudah sedemikian memudar. Salah satu penyebabnya hiperkomersialisasi produk media sehingga media lebih merepresentasikan diri sebagai ‘alat’ elit politik dan ekonomi dibandingkan dengan ruang publik dimana persoalan-persoalan publik didiskusikan (Chesney, 2000).

Dengan melihat keuntungan-keuntungan media baru, kiranya, tidak diragukan lagi kontribusi media ini dalam mendorong para pengguna untuk lebih aktif dalam proses komunikasi. Merepresentasikan diri mereka sendiri dengan proses komunikasi yang lebih partisipatif. Seperti ditegaskan oleh Hartley (2010: 188), media baru, sebagai contoh game komputer merupakan media interaktif antara pengguna dan perusahaan pembuatnya, dengan proporsi isi sebenarnya datang dari konsumen yang menjadi lebih seperti rekan kerja ketimbang klien penyedia isi media. Dengan kata lain, model media satu untuk semua (*one-to-many*) telah digantikan dan sekarang ‘isi’ telah terintegrasi dengan telekomunikasi dan interaktivitas komputer, yang memungkinkan komunikasi ‘banyak-ke-banyak, termasuk individu-ke-individu pribadi yang lain.

Masalah di Perbatasan: Infrastruktur dan Persoalan Representasi

Pada 2014, ketika saya dan teman-teman melakukan penelitian di daerah perbatasan mengenai peran LPP RRI dalam mengonstruksikan Indonesia di perbatasan, infrastruktur menjadi persoalan yang sangat penting. Diantara isu pembangunan infrastruktur, sarana jalan atau transportasi, pendidikan, dan sarana kesehatan menjadi isu yang menonjol yang menurut mereka layak diangkat ke tingkat nasional. Di Entikong, oleh karena persoalan transportasi dan sarana kesehatan yang buruk, penduduk di daerah itu lebih banyak berobat ke Malaysia. Di Boven Digul, masyarakat bahkan harus berjalan beberapa jam hanya untuk mendapatkan layanan puskesmas. Terkait infrastruktur, penelitian tersebut menyimpulkan sebagai berikut.

Di hampir seluruh wilayah yang menjadi lokasi penelitian, yakni Boven Digoel, Atambua, Entikong, Nunukan, dan Batam kondisi masyarakatnya relatif miskin dan terbelakang. Barangkali, hanya di Batam dimana wilayah perbatasan menjadi pusat industri dan pembangunan. Ini menjadikan Batam jauh lebih maju dibandingkan daerah-daerah perbatasan lainnya, tapi, secara umum, wilayah ini tetap kalah jauh dibandingkan dengan Singapura. Sementara di wilayah-wilayah lainnya, pembangunan infrastruktur jauh tertinggal. Di daerah perbatasan seperti Entikong, Nunukan, dan Boven Digoel, infrastruktur jalan, listrik, infrastruktur pendidikan dan

kesehatan sangat minim. Secara keseluruhan, daerah-daerah perbatasan Indonesia dilihat dari infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat kalah dibandingkan dengan negara tetangga. Bahkan, di Atambua sekalipun, dimana mereka berhadapan langsung dengan Timor Leste yang sebelumnya menjadi bagian dari Indonesia (Rianto dkk, 2014: 255).

Bukan hanya persoalan infrastruktur, masyarakat perbatasan juga lebih menjadi objek dibandingkan sebagai subjek. Bahkan, dalam pembangunan yang diorientasikan secara khusus untuk masyarakat perbatasan. Ini, misalnya, terefleksi dalam kutipan dari salah seorang informan di Entikong, Antonius Angeu berikut.

Kita selama ini program yang dibuat oleh BNPP itu, kita tidak tahu. Jadi kalau ada program dari BNPP kita terima saja. Misalkan jalan kan. Kita *nggak* tahu itu dari mana, itu mereka mau bikin apa gitu. Makanya saya mintalah BNPP atau pemerintah pusat dalam mengelola perbatasan itu harus mendengarkan dari masyarakat langsung, mana sih yang lebih tepat untuk dibangun. Jangan langsung tembak-tembak sajarah program itu. Atau bisa saja program itu untuk mencari keuntungan saja kan. Kalau misalnya koordinasi bekerja sama dengan pemerintah setempat atau masyarakat itu kan lebih efektif. Kita lebih tahu mana sih yang prioritas atau lebih diperlukan (Rianto dkk, 2014: 135).

Keberadaan masyarakat perbatasan yang lebih menjadi objek ketimbang subjek juga berimbas pada langkanya representasi dalam wacana nasional. Seperti dikemukakan Daud Arfussau, dalam konteks pemberitaan RRI tentang pembangunan di Boven Digoel, adalah sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat di daerah lain agar mereka mengetahui kondisi dan perkembangan di daerah perbatasan. Informasi ke luar seperti ini memiliki peran penting dalam membuka wawasan publik di luar daerah agar mereka memahami apa yang terjadi di perbatasan. Informasi ini bagi publik, terutama yang menaruh perhatian dan kepedulian dengan persoalan pembangunan di daerah perbatasan, dapat dijadikan rujukan untuk ikut turut serta memantau proses pembangunan di perbatasan dan memberikan dukungan kepada masyarakat setempat. Informasi yang disiarkan oleh RRI tentang daerahnya dapat berfungsi sebagai ‘penyambung lidah’ masyarakat untuk dapat meyakinkan pemerintah pusat tentang perlunya pemecahan permasalahan di daerah (lihat Rianto dkk, 2014). Kasus tentang kurang terpeliharanya artefak sejarah di Boven Digoel, menurut Yeyasa Merasi, Wakil Bupati Boven Digoel, misalnya, perlu disoroti oleh RRI agar pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah melestarikannya. Begitu pula dengan kasus tentang pengungsi di PNG yang menginginkan kembali ke tanah air juga, selayaknya disiarkan oleh RRI untuk mendapatkan respon dari pemerintah pusat. Yeyasa Merasi, misalnya, menunjukkan bagaimana siaran RRI berpotensi membuat perubahan di daerah sebagaimana bisa dilihat dalam kutipan berikut.

Contohnya kemarin, kita mengangkat masalah masyarakat di perbatasan yang hendak kembali ke Indonesia dalam program Indonesia Menyapa. Saya yang mengangkat topik itu. Kebetulan saat itu ada masyarakat yang ingin kembali pulang ke Indonesia. Mereka di perbatasan. Namun, masalahnya, akses jalannya tidak lancar dan perhatian pemerintah kurang. Akibat siaran itu, kita sebenarnya juga sudah mendapat perhatian (dari pusat) (Rianto dkk, 2014: 51).

Kutipan di atas merefleksikan bahwa masyarakat perbatasan mengalami krisis representasi. Sebaliknya, mereka lebih banyak mendengarkan dari luar dibandingkan dengan pihak luar. Sentralisme media massa memperparah kondisi ini. Siaran yang Jakarta centris menciptakan marginalisasi masyarakat perbatasan sehingga tidak menjadikannya sebagai pusat perbincangan dalam wacana nasional. Sebaliknya, wacana lebih didominasi oleh isu-isu yang berputar di Jawa terutama Jakarta.

Centering the Margin: Masyarakat sebagai Pelaku dan Pokok Pembicaraan

Peter Burke (2011: 118) mengemukakan bahwa 'daerah pinggiran' adalah konsep yang relatif baru muncul sebagai akibat adanya perdebatan diantara ekonomi pembangunan seperti Raul Prebisch, Andre Gunder Frnak dan juga Paul Baran. Dengan mengikuti analisis Lein dan Marx, dikemukakan bahwa dalam konteks pusat dan pinggiran ini, "Ibu kota menyedot surplus ekonomi daerah-daerah satelit dan menggunakannya untuk kepentingan pembangunan ibu kota itu sendiri" (lihat Burke, 2011: 118).

Burke lebih jauh mengemukakan bahwa pusat dan pinggiran dalam perkembangannya tidak lagi semata digunakan untuk pembangunan ekonomi kapitalis, tapi juga digunakan dalam analisis bidang politik hingga kebudayaan. Dengan merujuk pada studi yang dilakukan William McNeil mengenai Ottoman Turki, Burke mengemukakan bahwa "pusat dapat terus memperpanjang keberadaan kekuatan militernya dalam skala besar hanya dengan cara meneror masyarakat daerah pinggiran' (Burke, 2011: 119). Penaklukan tersebut menurut Burke telah memungkinkan kekaisaran mendapatkan harta rampasan yang menghindarkan dirinya dari melakukan eksploitasi terhadap masyarakat petani di dekat kota. Ini pada akhirnya mendorong Ottoman untuk terus melakukan invasi hingga akhirnya mencapai batas yang tidak bisa lagi dikontrol, dan hal itu menciptakan tercerai-berainya politik.

Dalam konteks pusat kebudayaan, Edward Shils telah menganalisis apa yang dimaksudkan sebagai sistem nilai pusat dan sistem kelembagaan pusat yang disahkan oleh sistem tersebut (Burke, 2011: 122). Mengutip Shils, Burke menuliskan hal itu sebagai berikut.

Disebut pusat karena hubungan dekatnya dengan apa yang diyakini masyarakat sebagai sakral; dan dikatakan pusat karena didukung oleh pejabat-pejabat yang berkuasa dalam masyarakat. Kedua macam sentralitas itu memang memiliki kaitan yang amat penting. masing-masing menentukan dan mendukung satu sama lain.

Analisis lebih lanjut mengenai daerah pinggiran dan pusat dilakukan dengan mengaitkannya dengan daerah perbatasan. Sebagaimana dikemukakan Burke (2011: 124), "Pendekatan yang lebih positif dan konstruktif terhadap pinggiran mungkin dengan menganalisisnya sebagai daerah perbatasan..., sebagai daerah yang menginginkan kebebasan dan kesetaraan, tempat berlindungnya para pemberontak dan penyebar berita bid'ah".

Gagasan Burke yang belakangan ini tampaknya *compatible* dengan apa yang terjadi di Indonesia, terutama selama masa Orde Baru dan awal reformasi. Pada satu sisi, ada aspirasi yang luas dari masyarakat perbatasan akan kebebasan dan kesetaraan, tapi di sisi lain mereka menghadapi pemarginalan yang terus-menerus. Baru pada masa pemerintahan Jokowi-JK,

gagasan centering the margin mulai digerakkan. Gagasan dasarnya adalah meletakkan pinggiran sebagai pusat dari aktivitas ekonomi, politik, dan budaya.

PENUTUP

Sifat partisipatif media baru tak ayal menjanjikan bagi upaya menghadirkan masyarakat perbatasan sebagai subjek dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Meskipun demikian, ada satu soal terkait hal ini, yakni kelangkaan infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi. Persoalan infrastruktur yang dihadapi masyarakat perbatasan meliputi diantaranya infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya terutama kelangkaan listrik. Di Nunukan, misalnya, masyarakat mengandalkan genzet karena listrik PLN sering mati. Sementara itu, kelangkaan infrastruktur komunikasi membuat masyarakat tidak mudah untuk mendapatkan siaran nasional. Signal handphone juga relatif kurang bagus. Sebaliknya, mereka lebih sering mendapatkan siaran dari negara tetangga. Meskipun pemerintah telah mencanangkan pembangunan ring palapa dan broadband masuk ke wilayah perbatasan, tapi langkanya sumber daya manusia sebagai akibat kurangnya pendidikan menciptakan persoalan literasi media. Sebagian wilayah perbatasan, sebagian telah mengakses internet dengan baik tapi bagaimana internet itu digunakan masih menimbulkan persoalan.

Penelitian dan observasi selama bulan Agustus-Septmber 2016 di Batam, Nunukan, Entikong, Atambua, dan Jayapura menemukan hal yang lebih positif. Kebijakan centering the margin yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK terutama di bidang telekomunikasi telah memungkinkan daerah perbatasan mendapatkan signal handphone yang jauh lebih baik. Kunjungan yang saya lakukan di Atambua dan Nunukan, misalnya, menemukan akses internet yang jauh lebih baik. Di Atambua, internet mempunyai kecepatan yang cukup untuk mengunduh gambar dan menonton siaran youtube. Di Nunukan, juga demikian. Dibandingkan dengan tahun 2007 ketika pertama kali saya berkunjung ke wilayah itu, kondisinya sudah sangat jauh berbeda. Pada 2007, koran terbatas dan hanya ditemukan ketika orang luar masuk membawa koran. Sekarang, koran jauh lebih mudah ditemukan. Namun, kendala utamanya adalah ketiadaan listrik yang mencukupi. RRI bahkan mengalami kesulitan karena kurangnya pasokan listrik PLN.

Hasil pembangunan dalam beberapa tahun belakang telah bisa dirasakan di wilayah perbatasan, utamanya di bidang telekomunikasi telah membuka keterisolasian wilayah itu dari dunia luar. Masuknya internet memungkinkan masyarakat untuk mempresentasikan dirinya ke dunia, tidak hanya Indonesia tapi juga ke seluruh dunia. Namun, masalahnya adalah pada literasi. Internet mungkin akan mentransformasikan masyarakat menjadi pelaku dan subjek dalam dunia sosial dan politik yang luas. Namun, hal itu hanya mungkin jika para penggunanya cukup literate untuk menggunakan teknologi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bermejo, Fernando (2009). "Audience Manufacture in Historical Perspective: From Broadcasting to Google, *New Media & Society*, Sage Publication, hal. 133-154
- Burke, Peter (2011). *Sejarah dan Teori Sosial*. terjemahan Mestika Zed dan Zulfami. Jakarta: Yayasan Obor

- Hartley, John (2010). *Communication, Cultural, and Media Studies: Konsep Kunci*, Yogyakarta: Jalasutra
- Keller, Annet (2009). *Tantangan dari Dalam: Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional (Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, dan Republika)*, Jakarta: FES
- Lister, Martin; John Dovey, Seth Giddings, Iain Grant & Kieran Kelly (2009). *New Media: Critical Introduction*. second edition. London and New York: Routledge
- McChesney, Robert W., (2000). *Rich Media, Poor Democracy: Communication in Dubious Times*, New York: The New Press
- Rianto, Puji; Wisnu Martha Adiputra, Anna Susilaningtyas, Rahayu, Novi Kurnia, Intania P, Maulin Niam, Ayya Sofia (2014). *Peran LPP RRI dalam Mengonstruksikan Identitas Nasional Indonesia di Wilayah Perbatasan*, Jakarta: Puslitbangdiklat LPP RRI
- Rianto, Puji (2011). "ICTs: Keterbukaan Informasi dan Tantangan Baru bagi Pemerintah". Dalam S Arifianto (ed.). *Membangun Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Puslitbangdiklat Aplikasi Informatika
- Shoemaker, Pamela J. & Stephen D. Reese (1996). *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. Second Edition. New York: Longman
- Stephen H Chaffee dan Mirriam J. Metzger, (2001). "The End of Mass Communication?" *Mass Communication & Society*, 2001, 4(4), 365-379